

PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN KURIKULUM

ADI SAPUTRA

Abstract: *This paper tried reveal the principles of curriculum management. It was found that; There are several principles that must be considered in implementing such a curriculum management: Productivity, the results obtained in the curriculum activities is an aspect that should be considered in the management curriculum. Consideration of how to make the students can achieve the learning outcomes in accordance with the objectives of the curriculum should be a goal of curriculum management. Democratization, implementation of curriculum management should be based on democracy that puts managers, implementers and students on subjects that should be in a position of carrying out their duties with full responsibility to achieve the objectives of the curriculum. Cooperative, to obtain the expected results in the curriculum management activities necessary to positive cooperation from the parties involved. Effectiveness and Efficiency, The set of curriculum management activities should consider the effectiveness and efficiency to achieve the objectives of the curriculum, so that the curriculum management activities provide useful results to the cost, effort, and a relatively short time. Directing the vision, mission, and goals set forth in the form of curriculum, the curriculum management process should be able to strengthen and direct the vision, mission, and objectives of the curriculum.*

Kata Kunci: Prinsip, Manajemen, Kurikulum

A. PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan Nasional di Indonesia tentu saja bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Sebagai implikasi dari nilai-nilai filsafat pancasila yang dianut bangsa Indonesia, dicerminkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional seperti terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003, yaitu : Pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi *mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.* (pasal 2 dan 3).¹

Menurut Tyler (1946), Taba (1963) dan Tanner (1984) menyatakan tuntutan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Calhoun, Light, dan Keller (1997) memaparkan tujuh fungsi sosial pendidikan, yaitu : (1) mengajar

keterampilan, (2) mentramisikan budaya, (3) mendorong adaptasi lingkungan, (4) membentuk kedisiplinan, (5) mendorong bekerja kelompok, (6) meningkatkan perilaku etik, dan (7) memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi.

Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Herbert Spencer dalam Nasution (1982) mengungkapkan lima kajian sebagai sumber dalam merumuskan tujuan pendidikan, yaitu:

1. *Self-Preservation*, yaitu individu harus dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan sehat, mencegah penyakit, hidup secara teratur.
2. *Securing the necessities of life*, yaitu individu yang harus sanggup mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan suatu pekerjaan.²
3. *Rearing of family*, yaitu individu juga harus mampu menjadi menjadi ibu yang sanggup bertanggung jawab atas pendidikan anaknya dan kesejahteraan keluarganya.
4. *Enjoying proper social and political relationships*, yaitu individu harus sanggup memanfaatkan waktu senggangnya dengan memilih kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menambah kenikmatan dan kegairahan hidup.

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat.

Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya dipergunakan bagi para penyusun kurikulum (*makro*) atau kurikulum tertulis yang sering disebut juga sebagai kurikulum ideal, akan tetapi terutama yang harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum (*mikro*) yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan, sebagai bahan untuk dijadikan implementasi kurikulum disetiap jenis dan jenjang pendidikan/persekolahan. Dengan posisinya yang penting tersebut, maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dalam melakukan proses penyelenggaraan

pendidikan, sehingga dapat memfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien.

B. PENGERTIAN MANAJEMEN KURIKULUM

Dalam studi manajemen terdapat berbagai pandangan yang mencoba merumuskan definisi manajemen dengan titik tekan yang berbeda-beda. Salah satu rumusan operasional yang memungkinkan dapat diajukan, bahwa manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.³

Bertitik tolak dari rumusan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

1. Manajemen merupakan suatu proses sosial yang merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih secara formal.
2. Manajemen dilaksanakan dengan bantuan sumber-sumber, yakni : sumber manusia, sumber material, sumber biaya, dan sumber informasi
3. Manajemen dilaksanakan dengan metode kerja tertentu yang efisien dan efektif, dari segi tenaga, dana, waktu dan sebagainya.
4. Manajemen mengacu pencapaian tujuan tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya.

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.⁴

Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar masyarakat merasa memiliki sekolah. Sehingga terbentuk sinerjik antara sekolah dengan masyarakat untuk mewujudkan program-program sekolah. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat

membantu dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.⁵

C. RUANG LINGKUP MANJEMEN KURIKULUM

Studi manajemen kurikulum adalah bagian integral dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan umumnya dibidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan tentu telah mengenal, bahwa studi tentang pengembangan kurikulum merupakan suatu cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengandung ruang lingkup yang sangat luas. Studi ini bukan saja mencakup kegiatan mempelajari dasar- dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan. Disamping itu meliputi studi yang mendalam tentang bidang-bidang: perencanaan kurikulum, manajemen kurikulum, evaluasi dan riset kurikulum.⁶

Pokok kegiatan utama studi manajemen kurikulum adalah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, dan perbaikan kurikulum. Manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum berdasarkan asumsi bahwa: telah tersedia informasi dan data tentang masalah- masalah dan kebutuhan yang mendasari disusunnya perencanaan yang tepat. Manajemen pelaksanaan kurikulum berdasarkan asumsi bahwa kurikulum telah direncanakan sebelumnya dan siap dioperasikan. Manajemen perbaikan berdasarkan asumsi, bahwa perbaikan, kurikulum sekolah perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi kurikulum berdasarkan asumsi, bahwa perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan kurikulum membutuhkan informasi balikan yang akurat. Dengan demikian jelaslah, bahwa perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, pengadministrasian, evaluasi dan perbaikan kurikulum bergerak dalam suatu sistem dalam siklus yang berkesinambungan, dalam lingkungan proses sistem pendidikan menyeluruh.

D. PRINSIP DAN FUNGSI MANAJEMEN KURIKULUM

Prinsip dan fungsi kurikulum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah beberapa hal sebagai berikut, yaitu :

1. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai tujuan hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran manajemen kurikulum.

2. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus beraskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

3. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.

4. Efektifitas dan Efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.⁷

5. Mengarahkan Visi, Misi, dan Tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional. Seperti UUSPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), keputusan dan pengaturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang sekolah yang bersangkutan.⁸

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum di antaranya :

1. Meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.

2. Meningkatkan keadilan (equity) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kulikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.

3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.

4. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

E. KOMPONEN-KOMPONEN KURIKULUM

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tersebut ialah :

1. Komponen Tujuan

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau system nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan, filsafat atau sistem nilai yang dianut

masyarakat Indonesia ialah Pancasila, maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah membentuk masyarakat yang Pancasila. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran.

Tujuan pendidikan mempunyai klasifikasi, dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang sangat khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi empat:

a. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN)

Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan, artinya setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggara oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non formal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dari filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas Tujuan Pendidikan Nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 3, bahwa pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.

b. Tujuan Instusional (TI)

Tujuan Instusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh pendidikan di suatu lembaga tertentu. Tujuan Instusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan oleh jenjang pendidikan seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi.

c. Tujuan Kurikuler (TK)

Tujuan Kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Oleh sebab itu tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan.

Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian setiap tujuan kurikuler harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan instusional. Contoh tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi matematika di SD, tujuan pembelajaran IPS di SLTP dan lain sebagainya. Dalam kurikulum yang berpotensi pada pencapaian kompetensi, tujuan kurikuler menggambarkan standar isi setiap mata pelajaran yang harus dikuasi oleh peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan instruksional atau sekarang lebih populer dengan tujuan pembelajaran, merupakan tujuan yang paling khusus.

d. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam sekaqli pertemuan. Karena hanya guru yang memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran disuatu lembaga pendidikan, maka menjabarkan tujuan pembelajaran ini adalah tugas guru. Sebelum guru melakukan proses belajar mengajar (PBM), guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Menurut Bloom, dalam bukunya *Taxonomy of Educational Objectives* yang terbit tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan kedalam tiga klasifikasi atau tiga domain (bagian), yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor.

2. Komponen Isi/ Materi Pembelajaran

Pada komponen isi kurikulum lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang

disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut.

3. Komponen Metode

Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang akan dicapai dalam setiap pokok bahasan. Dalam posisi ini guru hendaknya tidak menerapkan satu metode saja, tapi guru dapat menerapkan berbagai macam metode agar PBM berlangsung dengan menyenangkan dan mencapai sasaran yang direncanakan. Dengan demikian rencana yang sudah disusun dapat diterapkan secara optimal.

4. Komponen Evaluasi

Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir (Oliva, 1988). Proses tersebut meliputi perencanaan implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut maka dalam konteks pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Melalui evaluasi, dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak; bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen-komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum evaluasi itu dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum, atau evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut menurut Scriven (1967) adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif.⁹

Manajemen kurikulum dan perkembangan diarahkan agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum agar proses belajar mengajar memiliki makna yang mendalam pada diri siswa dan guru. Kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta melakukan supervisi dalam pelaksanaannya. Kepala sekolah bekerja keras dan bertanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap perbaikan dan perkembangan kurikulum dan pembelajaran. Untuk

ketercapaian program kurikulum dan pembelajaran yang efektif, kepala sekolah bersama guru harus menjabarkan isi kurikulum secara rinci dan operasional kedalam, program tahunan¹⁰, semester dan bulanan. Sedangkan program mingguan atau satuan pembelajaran, wajib dipahami guru sebelum melakukan proses belajar mengajar. Agar proses belajar mengajar berjalan lancar maka langkah yang harus dilakukan yaitu :

1. Tahap Perencanaan.

Pada tahap ini perlu dijabarkan menjadi rencana pembelajaran. Guru melakukan persiapan yang komprehensif sebelum melakukan PBM dikelas. Pada tahap ini guru mempersiapkan mulai dari tujuan pembelajaran, buku sumber atau referensi, dan alat evaluasi yang diterapkan. Dalam tahap perencanaan ini pula perlu dipahami hal-hal sebagai berikut : (a) menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP), (b) memiliki kalender akademik, (c) menyusun program tahunan (PROTA), (d) menyusun program semester, (e) program satuan pelajaran, dan (f) rencana pengajaran. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pedoman guru dalam melaksanakan PBM, oleh karena itu kepala sekolah perlu memberikan perhatian, pembinaan dan bantuan serta memeriksa pekerjaan guru tersebut. Kepala sekolah melakukan pemeriksaan secara cermat untuk memberikan penilaian dan umpan balik apabila ada yang perlu diperbaiki dan ditambahkan.

2. Tahap Pengorganisasian dan Koordinasi

Pada tahap ini merupakan tahap yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh kepala sekolah beserta tim yang dibentuk untuk memudahkan pembagian tugas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kepala sekolah berkewajiban untuk mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta program kegiatan sekolah. Kepala sekolah berkewajiban mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta kegiatan sekolah. Pada tahap ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Kalender akademik disusun berdasarkan rencana program kegiatan yang akan berlangsung di sekolah selama satu tahun kedepan. Penyusunan kalender akademik memberikan arah yang jelas tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama satu tahun kedepan. Kalender akademik disusun berdasarkan kebutuhan dan hasil pemikiran bersama antara kepala sekolah dan guru

akan memberikan kejelasan dalam merealisasikan program kegiatan sekolah. Kalender akademik yang telah disusun ini disosialisasikan kepada seluruh guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Dengan mengetahui kalender akademik diharapkan akan terjadi sinergi dalam mewujudkan program kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah.

b. Penyusunan jadwal pelajaran didasarkan kepada kewajiban mengajar guru 5 hari/minggu. Jadwal pelajaran disusun berdasarkan hasil musyawarah bersama, antara kepala sekolah dan guru. Dengan demikian guru akan bertanggung jawab dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran diharapkan guru mengikuti kegiatan dalam MGMP.

c. Pengaturan tugas dan kewajiban guru dilandasi oleh kebersamaan, keadilan, dan tidak menimbulkan permasalahan. Pembagian tugas dan kewajiban guru ini disesuaikan dengan bidang keahlian dan minat guru tersebut. Pembagian tugas didasarkan kepada beban tugas minimal dan keahliannya. Dengan demikian pada setiap guru diharapkan akan tumbuh motivasi untuk berprestasi, kebersamaan dalam merealisasikan program sekolah, sinerjik antara pimpinan, guru staf TU, dan orang tua dalam upaya meningkatkan mutu sekolah.

d. Program kegiatan sekolah disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk meningkatkan, mengembangkan dan memajukan sekolah. Program kegiatan sekolah disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan diwujudkan dalam kepemimpinan kepala sekolah bersama-sama seluruh komppen sekolah. Program kegiatan sekolah meliputi program internal sekolah dan program eksternal yang akan dilaksanakan sekolah. Program yang berkaitan dengan penungkatan mutu pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru dan staf TU, program penataan kurikulum, program pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, program pengelolaan keuangan sekolah, program pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat. Berbagai program kegiatan sekolah 1 tahun samapai dengan 5 tahun kedepan perlu diorganisir dan dikordinasikan secara cermat dan transparan.

3. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini merupakam tahap yang paling menentukan apakah sekolah dibawah kepemimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan program sekolah atau tidak. Perencanaann, pengorganisasian dan koordinasi yang telah disusun akan dibuktikan keberhasilannya dalam tahap pelaksaan ini. PBM akan berjalan secara

efektif apabila guru dan kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik apabila guru dan kepala sekolah bersama-sama membuka diri terhadap masukan atau kritikan yang membangun.

Sebagai guru harus siap diberi masukan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Begitu juga sebaliknya, apabila kepala sekolah tidak melakukan supervisi (tidak berdasarkan fakta dan data) yang diperoleh langsung oleh kepala sekolah, maka masukan yang diberikan kepala sekolah tidak valid dan berpengaruh negatif terhadap kinerja guru. Dengan demikian, kepala sekolah dan guru akan terbuka dalam memberikan masukan atau kesulitan yang dihadapi dengan tujuan untuk kemajuan dan peningkatan mutu pembelajaran.¹¹

4. Tahap Evaluasi dan Pengendalian

Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif atau tidak dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting dilakukan secara benar karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan lancar atau tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan. Guru perlu menetapkan jenis evaluasi apa yang digunakan dan hasil evaluasi diharapkan akan memiliki pengaruh dan dampak terhadap perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran selanjutnya. Dengan dilaksanakannya evaluasi ini akan memberikan dampak dan manfaat bagi guru dan siswa untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Disamping itu evaluasi yang dilakukan oleh guru dapat menjadi masukan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dari sekian banyak siswa tentunya ada diantara mereka yang menemui kesulitan dalam belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat dilakukan pemantapan atau perhatian khusus agar tidak ketinggalan dan dapat menyesuaikan diri dengan yang lainnya. Dalam mengatasi kesulitan belajar siswa perlu dicarikan solusinya, misalkan dengan remedial, pemantapan, belajar dengan teman sejawat yang lebih pandai, atau membentuk belajar kelompok yang dibimbing oleh guru.¹²

Dengan demikian evaluasi dapat juga menjadi umpan balik bagi guru untuk lebih meningkatkan kualitas mengajarnya. Agar evaluasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan perlu diperhatikan dari mulai persiapan awal, menyiapkan bahan-bahan evaluasi yang diperlukan, menyusun kisi-kisi evaluasi, menyusun bentuk

tes, menyusun butir-butir soal, memvalidasi, menyiapkan jawabannya, membuat jadwal pemeriksaan serta penyerahan hasil evaluasi tepat waktu. Penyusunan soal sebaiknya melibatkan beberapa guru bidang studi sejenis atau bersama MGMP. Kepala sekolah berperan dalam pengendalian system evaluasi agar¹³ evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru untuk melakukan evaluasi dengan objektif agar hasil evaluasi benar-benar menunjukkan hasil belajar siswa yang sesungguhnya. Sehingga prestasi yang diraih oleh siswa merupakan kerja keras siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan objektif dapat mengukur kemampuan siswa akan berdampak pada peningkatan mutu yang berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum diantaranya :

1. *Produktivitas*, hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
2. *Demokratisasi*, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
3. *Kooperatif*, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari pihak yang terlibat.
4. *Efektivitas dan Efisiensi*, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relative singkat.

5. *Mengarahkan visi, misi, dan tujuan* yang ditetapkan dalam bentuk kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu mempertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional, seperti UUSPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, kebijaksanaan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang bersangkutan.

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum diantaranya meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran¹⁴, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum.

Penulis: Adi Saputra, M.Pd, adalah Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi, Pengembangan kurikulum teori dan praktek. Jokjakarta: ar-Ruzz Media, 2007
- E. Mulyasa, M.Pd, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan*, Phidadelphia, London, 1993.
- Hamza perencanaan pembelajaran Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Hamid hasan, Evaluasi Kurikulum Bandung Remaja Rosda karya, 2008
- Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan, Langkah praktis Mewujudkan Lembaga pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami)., Holistica, Lombok 2012
- Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi daerah Konsep, Strategi dan Implementasi Alfabeta Bandung 2011.
- Oemar Hamalik, Dasar-dasar pengembangan kuriulum. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Muhaimin M.A Manajemen Pendidikan “Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekoah/ Madrasah.
- Nana syaodih Sukmadinata, Pengembangan kurikulum, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Ngalim Purwanto, MP, *Administrasi & Supervisi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Undang- undang no 20 tentang pendidikan Nasional pasal 3

END NOTE

¹Undang- undang no 20 tentang pendidikan Nasional pasal 3

²Oemar Hamalik, *Dasar-dasar pengembangan kuriulum*. Bandung Remaja Rosdakarya. H. 131.

³Oemar Hamalik, *Manajemen pengembangan kurikulum*.(Bandung PT Remaja Rosda karya), h. 28.

⁴*Ibid*. 68.

⁵abdullah idi, *pengembangan kurikulum*. (jogjakarta:ar-ruzzmedia2007), h. 85.

⁶*ibid*, h. 154

⁷abdullah idi, *pengembangan kurikulum teori dan praktek*. (jokjakarta:ar-ruzz media, 2007) h. 205.

⁸*ibid*, h. 218.

⁹nana syaodih sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007) h. 161.

¹⁰*Ibid*, h. 163.

¹¹Hamza, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h.3.

¹² *Ibid*, h. 120.

¹³ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung Remaja Rosda karya,2008), h. 103.